

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pengertian Kekuasaan Informal

Dalam kajian ilmu politik dan sosiologi politik, pembahasan tentang kekuasaan tidak selalu identik dengan jabatan resmi, kewenangan hukum, atau struktur negara. Kekuasaan juga dapat bekerja melalui jalur-jalur non-formal yang tidak tertulis dalam regulasi, namun nyata memengaruhi keputusan publik, perilaku politik warga, dan arah kontestasi elektoral. Kekuasaan semacam ini umumnya disebut sebagai kekuasaan informal, yakni kapasitas aktor untuk memengaruhi pihak lain di luar mandat legal-formal, melalui pengaruh sosial, otoritas moral, jaringan relasi, dan kontrol atas akses sumber daya.

Miriam Budiardjo merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku pihak lain sesuai kehendak pelaku. Rumusan ini penting karena menempatkan kekuasaan sebagai relasi pengaruh, bukan semata atribut jabatan. Dari sini, ketika “kemampuan memengaruhi” itu tidak bertumpu pada aturan dan mandat formal (misalnya SK, kewenangan birokrasi, prosedur institusi), melainkan bertumpu pada reputasi, norma sosial, kedekatan jaringan, atau otoritas moral, maka yang bekerja adalah kekuasaan informal. (budiardjo.M)

Secara konseptual, kekuasaan informal dapat dipahami sebagai “kemampuan memengaruhi” yang melekat pada relasi sosial dan mekanisme pengaruh yang hidup dalam praktik sehari-hari. Di ranah lokal, mekanisme ini sering beroperasi lewat norma komunitas (misalnya rasa sungkan, kepatuhan pada tokoh), serta jalur perantara (broker) yang menghubungkan warga dengan sumber daya dan keputusan. Dalam banyak studi politik Indonesia, jalur informal ini kerap hadir karena ada “celah” pada kerja institusi formal misalnya layanan birokrasi tidak merata, prosedur tidak transparan, atau partai lemah di tingkat akar rumput sehingga warga mencari kepastian melalui tokoh-tokoh yang dipercaya dan punya “daya urus” di luar prosedur resmi. Kerangka semacam ini sering muncul dalam kajian patronase/klientelisme pemilu di Indonesia, yang menunjukkan bagaimana

jejaring informal dan perantara menjadi mesin politik elektoral (Pamungkas.S 2014).

Dalam demokrasi lokal, kekuasaan informal sering hadir karena dua alasan besar. Pertama, keterbatasan efektivitas institusi formal (birokrasi tidak responsif, layanan publik tidak merata, penegakan aturan lemah). Pada situasi seperti ini, figur non-formal dapat menjadi “solusi praktis” untuk menyelesaikan urusan warga: membantu akses bantuan, memediasi konflik, atau membuka jalur menuju elite formal. Kedua, kekuatan legitimasi sosial-budaya (agama, tradisi, ketokohan) yang membuat arahan tokoh tertentu lebih dipercaya dibanding pesan formal negara. Di banyak wilayah Indonesia, otoritas sosial-keagamaan masih menjadi sumber rujukan kuat, sehingga kepatuhan sering lahir bukan dari ancaman sanksi formal, melainkan dari ikatan moral, kewajiban sosial, dan norma komunitas.

berdasarkan temuan lapangan, dipahami bukan sebagai kewenangan administratif, melainkan sebagai kemampuan aktor non-negara memengaruhi sikap sosial dan pilihan politik warga. Perspektif ini bahkan diakui oleh aktor formal pemerintahan daerah. Wakil bupati Bangkalan, Fauzan Ja’far, menjelaskan bahwa kekuasaan informal merupakan pengaruh sosial yang dijalankan di luar struktur resmi pemerintahan, namun berdampak nyata terhadap perilaku masyarakat hingga arah dukungan politik; bahkan “satu kalimat saja bisa menggeser arah dukungan politik... satu desa, bahkan sampai satu kecamatan”. Pernyataan ini menguatkan kerangka Miriam Budiardjo yang memaknai kekuasaan sebagai kemampuan memengaruhi perilaku pihak lain; artinya, ketika kemampuan memengaruhi itu bekerja tanpa mandat legal-formal dan bertumpu pada relasi sosial, maka yang beroperasi adalah kekuasaan informal. (Wawancara Wakil Bupati Fauzan Ja’far)

Otoritas moral keagamaan kiai dapat berfungsi sebagai pusat rujukan sosial karena kiai dipandang sebagai pemimpin informal yang memiliki legitimasi keagamaan dan kedekatan sosial dengan warga. Sejumlah studi di Indonesia membahas bagaimana peran kiai dalam proses politik bekerja melalui pengaruh simbolik, otoritas moral, serta kemampuan menjadi simpul massa atau patron sosial (Fauzan.A 2013) Pada sisi lain, figur kuat lapangan seperti blater dapat bekerja sebagai simpul “pengaman” dan pengendali mobilisasi karena memiliki reputasi,

kontrol jejaring akar rumput, serta kapasitas menyediakan perlindungan atau “jaminan sosial” tertentu. Studi tentang local strongmen di Indonesia (misalnya pembahasan tentang kelompok orang kuat lokal seperti jawara/jago) menunjukkan pola umum: kekuatan informal sering bertumpu pada reputasi, jaringan, dan kemampuan mengelola kekerasan atau keamanan sosial yang kemudian bisa beririsan dengan arena politik elektoral.

Dengan demikian, kekuasaan informal bukan sekadar “kekuasaan gelap” atau “praktik ilegal”. Ia bisa hadir sebagai kekuatan sosial yang dianggap wajar dan dilegitimasi secara kultural. Justru karena dianggap wajar itulah, kekuasaan informal sering bekerja efektif: tidak memerlukan surat keputusan, tetapi cukup dengan simbol, restu, reputasi, dan jaringan relasi. Dalam pemilu lokal, mekanisme tersebut kerap bertemu dengan praktik patronase/klientelisme: dukungan politik dibangun melalui pertukaran akses, bantuan, perlindungan, atau keuntungan tertentu yang disalurkan lewat jaringan perantara. Literatur Indonesia tentang politik uang dan patronase menegaskan bahwa relasi semacam ini tidak selalu muncul sebagai transaksi uang tunai semata, melainkan dapat berupa bantuan material, akses program, pekerjaan, atau jasa-jasa nonformal yang memproduksi loyalitas politik. (Aspinall, E., & Berenschot, W.2019)

5.1.1 Perbedaan Kekuasaan informal dan kekuasaan Formal

Kekuasaan formal dan kekuasaan informal sama-sama menentukan “siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana”, tetapi keduanya bekerja melalui jalur legitimasi dan mekanisme kepatuhan yang berbeda. Kekuasaan formal beroperasi melalui aturan yang diakui negara dan melekat pada jabatan serta lembaga—misalnya kepala daerah, DPRD, birokrasi, kepolisian, pengadilan, dan perangkat regulasi (perda, keputusan kepala daerah, SOP pelayanan, mekanisme anggaran). Dalam kerangka Weber, bentuk ini paling dekat dengan otoritas rasional-legal, yakni legitimasi yang bersandar pada keabsahan prosedur, aturan, hierarki, dan administrasi birokratis. Ketika otoritas rasional-legal dominan, kepatuhan dihasilkan terutama karena warga/aktor politik mengakui “hak memerintah” yang dilembagakan dalam sistem aturan; jejak kekuasaan formal pun cenderung mudah dilacak lewat dokumen, tanda tangan, rapat resmi, kontrak, dan angka-angka anggaran.(Weber.M)

Sebaliknya, kekuasaan informal bekerja melalui norma sosial, jaringan patronase, status kultural, dan reputasi personal yang tidak selalu memiliki dasar legal. Ia bisa hadir dalam figur kiai/tokoh agama, tokoh adat, “orang kuat” lokal, pemimpin ormas, pengusaha setempat, maupun broker politik. Legitimasi kekuasaan informal sering bersumber dari kepercayaan, kharisma, tradisi, atau hubungan timbal balik (utang budi), sehingga kepatuhan terbentuk lewat persuasi moral, kontrol sosial, pemberian bantuan, akses ke pekerjaan/keamanan, hingga ancaman sanksi sosial dan kekerasan dalam konteks tertentu. Pola ini menjelaskan mengapa kekuasaan informal kerap “tidak terlihat” dalam dokumen resmi, tetapi nyata dalam praktik: rekrutmen perangkat, arah dukungan elektoral, distribusi proyek, atau penyelesaian konflik yang lebih efektif melalui tokoh jaringan ketimbang prosedur formal.

Perbedaan paling tegas terlihat pada sumber legitimasi dan mekanisme penegakan. Kekuasaan formal menegakkan keputusan melalui instrumen negara: regulasi, anggaran, aparat, sanksi administratif/hukum; akuntabilitasnya idealnya dapat dituntut lewat DPRD, audit, Ombudsman, pengadilan, atau pemilu. Kekuasaan informal menegakkan keputusan melalui relasi dan norma loyalitas, patronase, reputasi, kontrol akses sehingga akuntabilitasnya cenderung kabur karena bertumpu pada penerimaan komunitas atau kepatuhan jaringan. Namun, pada banyak kasus politik lokal, keduanya tidak berdiri terpisah: aktor informal dapat “menunggangi” institusi formal (misalnya memengaruhi seleksi kandidat, pengadaan, atau distribusi bantuan), sementara pejabat formal dapat memanfaatkan jaringan informal untuk konsolidasi dukungan dan stabilitas.

5.2 Struktur Kekuasaan Informal

5.2.1 Identifikasi Struktur Kekuasaan Informal di Bangkalan

Dalam demokrasi lokal Bangkalan, kekuasaan informal bisa dipahami sebagai semacam “tulang punggung sosial” yang membuat kerja politik di lapangan benar-benar bergerak. Ia tidak selalu tampil sebagai kekuasaan yang resmi, tetapi justru hadir lewat relasi sehari-hari yang hidup di masyarakat mulai dari pengaruh kiai/ulama, peran sesepuh desa, sampai figur blater. Pilkada 2024 memperlihatkan panggung yang cukup jelas tentang bagaimana aktor-aktor non-negara ini

mengarahkan dukungan melalui jaringan, ikatan loyalitas, dan pola pertukaran yang dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang wajar.

Untuk membaca struktur kekuasaan informal ini, ada dua kacamata teori yang cukup membantu. Pertama adalah patron client. Dalam relasi ini, hubungan politik berlangsung secara personal dan tidak setara, tetapi tetap saling menguntungkan. Patron yang biasanya memiliki pengaruh, akses, atau sumber daya memberikan proteksi, bantuan, atau kemudahan akses bagi orang lain. Sebaliknya, pihak yang berada pada posisi klien membalasnya dengan loyalitas, dukungan, dan kesediaan untuk ikut membantu mobilisasi. Pola seperti ini bertahan karena ia tidak berdiri di atas aturan formal, melainkan di atas kedekatan sosial dan kebutuhan praktis yang benar-benar dirasakan warga.

Kedua adalah teori local strongman. Teori ini menjelaskan peran figur atau kelompok kuat lokal yang mampu “menguasai” ruang sosial-politik di tingkat akar rumput. Mereka punya pengaruh karena menggabungkan beberapa hal sekaligus: jaringan sosial yang luas, otoritas yang diakui, dan kemampuan menjaga atau mengendalikan keamanan (dalam arti luas, termasuk menciptakan rasa aman atau mengatur situasi lapangan). Karena itulah, mereka sering menjadi simpul penting yang dibutuhkan aktor formal terutama kandidat dan tim pemenangan—untuk memastikan stabilitas, kontrol massa, dan legitimasi dukungan di tingkat lokal.

5.2.2 Peta Jaringan dan Alur Pengaruh Kekuasaan Informal di Bangkalan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur kekuasaan informal dalam Pilkada Bangkalan 2024 tidak berdiri sebagai “bayangan” dari institusi formal, melainkan hadir sebagai arsitektur sosial yang bekerja sehari-hari di tingkat komunitas. Struktur ini bergerak melalui relasi kepercayaan, reputasi, dan jaringan, sehingga keputusan politik warga sering kali terbentuk bukan di ruang rapat partai atau panggung kampanye resmi, tetapi di ruang-ruang sosial yang lebih intim: teras pesantren, forum pengajian, pertemuan warga, dan jejaring pergaulan desa. Dalam konteks seperti ini, kekuasaan tampil terutama sebagai kemampuan memengaruhi perilaku pihak lain, bukan semata kewenangan administratif, sejalan dengan pemaknaan kekuasaan sebagai relasi pengaruh dalam tradisi ilmu politik Indonesia (Migdal, 1988).

Jika struktur itu dilihat dari aktor-aktor yang bekerja di dalamnya, temuan memperlihatkan adanya pelapisan elite informal yang relatif jelas.

1. Di lapis atas, kiai terutama yang memiliki pesantren dan jejaring alumni luas berfungsi sebagai pusat otoritas moral dan rujukan sosial.
2. Pada lapis penghubung, penelitian ini menemukan bahwa anak kiai/ Gus berperan penting sebagai perantara (broker) yang menghubungkan pesantren, kandidat, dan komunitas. Peran ini masuk akal karena anak kiai memiliki kedekatan genealogis yang memperkuat legitimasi simbolik, sekaligus kapasitas praktis untuk bergerak lintas ruang (pesantren–desa–tim kampanye) lebih fleksibel dibanding figur kiai yang biasanya menjaga posisi moralnya.
3. Di lapis pengendali lapangan, blater menonjol sebagai pengelola ketertiban sosial, simpul pengamanan, dan penggerak mobilisasi. Sementara itu, di sekitar struktur inti tersebut beroperasi aktor pendukung seperti tim sukses, relawan, kepala desa/perangkat formal tertentu, serta jejaring pengusaha lokal yang turut memberi dukungan logistik atau akses

Pembagian lapisan ini kemudian membentuk pembagian peran yang saling melengkapi dalam praktik. Kiai menyediakan legitimasi simbolik: penilaian moral tentang kepantasan, “restu”, dan penerimaan sosial yang sulit ditandingi oleh kampanye formal. Anak kiai bekerja sebagai penerjemah kepentingan dan penghubung teknis: mereka menyampaikan kebutuhan komunitas kepada kandidat atau tim, sekaligus mengubah pesan politik kandidat menjadi bahasa relasi pesantren dan jejaring jamaah yang dapat diterima tanpa mengganggu wibawa kiai. Pada saat yang sama, anak kiai juga berfungsi sebagai pengatur ritme komunikasi kapan kandidat bisa berkunjung, siapa yang layak ditemui, isu apa yang sensitif sehingga hubungan kandidat dengan pesantren tetap berada dalam koridor adab dan norma lokal. Sementara itu, blater menyediakan kapasitas kontrol ruang: memastikan kegiatan politik berjalan aman, mengatur kerumunan, dan mengonsolidasikan dukungan dalam format yang lebih operasional

Untuk memahami mengapa kiai memiliki daya pengaruh sedemikian kuat, temuan lapangan mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut terutama bersumber

dari legitimasi religius dan kedekatan sosial yang direproduksi melalui institusi pesantren, pengajian, silaturahmi, serta jaringan santri–alumni lintas generasi. Dalam bahasa sosiologi, kiai memegang modal simbolik yang menjadikan perkataan, gestur penerimaan, atau restu sebagai penanda moral yang dipercaya. Pengaruh itu jarang hadir sebagai instruksi memilih secara eksplisit; justru ia bekerja lewat isyarat, reputasi, dan pembingkai etika tentang siapa yang dianggap amanah, patut, dan layak. Karena itu, preferensi politik warga terbentuk melalui proses sosial yang halus, tetapi tetap mengikat dalam kehidupan komunitas

Berangkat dari cara kerja tersebut, arena operasi kekuasaan informal dapat dibaca sebagai ruang-ruang sosial yang memiliki legitimasi budaya. Pada kiai, arena kunci berada di pesantren, pengajian, jaringan alumni, dan pertemuan silaturahmi. Arena ini bekerja sebagai ruang produksi kepercayaan: warga datang dengan tujuan religius, tetapi secara bersamaan terbentuk persepsi moral tentang kandidat dan kepemimpinan. Sementara itu, pada blater, arena kuncinya berada pada ruang komunal desa: pengamanan acara, pengelolaan ketertiban, mediasi sengketa, hingga pengaturan logistik kerumunan. Dua arena ini tidak selalu saling meniadakan; dalam banyak momen justru saling menopang untuk menjaga kohesi sosial, terutama ketika tensi politik meningkat menjelang pemilihan

Di titik inilah relasi kiai–blater menjadi penting untuk dibaca secara lebih proporsional. Temuan menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai konflik permanen. Kerja sama justru sering muncul secara fungsional, terutama ketika ada kebutuhan pengamanan kegiatan besar komunitas, agenda keagamaan, atau situasi yang memerlukan ketertiban. Ketegangan memang dapat muncul, tetapi cenderung situasional misalnya ketika terdapat tindakan yang dinilai melanggar norma agama atau mengganggu keselamatan sosial. Menariknya, ketegangan tersebut tidak selalu diselesaikan melalui konfrontasi, melainkan kerap dikelola melalui komunikasi halus dan mekanisme kontrol diri, yang menunjukkan bahwa kedua aktor memahami batas sosial untuk menjaga stabilitas desa

Hubungan ini kemudian beririsan dengan institusi formal dalam bentuk yang bersifat negosiatif. Pemerintah daerah dan aktor formal menyadari bahwa program dan kebijakan lebih mudah diterima ketika melewati kanal yang dipercaya

masyarakat. Karena itu, relasi formal–informal sering dipelihara melalui komunikasi, kunjungan, atau undangan dalam forum sosial-keagamaan. Dalam perspektif Weberian, negara bertumpu pada otoritas rasional-legal, tetapi dalam praktik lokal, implementasi kebijakan tetap membutuhkan legitimasi sosial yang berada di luar prosedur formal. Pada konteks ini, jaringan informal termasuk melalui figur kiai dan simpul-simpulnya berfungsi sebagai “jembatan penerjemah” antara bahasa negara dan bahasa komunitas (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dengan keseluruhan konfigurasi tersebut, peta jaringan dan alur pengaruh yang ditemukan dalam penelitian ini menegaskan bahwa Pilkada Bangkalan 2024 berlangsung dalam dua arena sekaligus: arena formal yang diikat aturan dan prosedur, serta arena sosial-kultural yang diikat reputasi, legitimasi moral, dan jaringan pengaruh. Kiai dan blater berperan sebagai simpul yang menghubungkan kedua arena tersebut: kiai menyalurkan legitimasi dan pemingkanaan moral kepemimpinan, sementara blater mengoperasionalkan dukungan melalui pengelolaan ruang sosial dan mobilisasi. Karena itu, memahami demokrasi lokal di Bangkalan tidak cukup hanya membaca institusi formal; ia perlu dipahami sebagai praktik sosial yang terus bernegosiasi dengan struktur kekuasaan informal yang hidup dan bekerja sehari-hari

5.2.3 Posisi Kiai dalam Struktur Elite Lokal Bangkalan

Di Bangkalan, kiai umumnya dipandang berada di lapis paling atas dalam susunan elite lokal. Pengaruh mereka tidak muncul dari jabatan formal pemerintahan, melainkan dari otoritas simbolik-keagamaan yang sudah lama tertanam dalam kehidupan sosial masyarakat. Reputasi moral, kemampuan memberi tuntunan, serta kedekatan emosional dengan warga membuat kiai menjadi rujukan bukan hanya untuk urusan ibadah, tetapi juga untuk keputusan-keputusan sosial yang lebih luas. Pengaruh ini makin kuat karena ditopang oleh pesantren sebagai institusi yang “mengikat” masyarakat lintas generasi: santri, alumni, wali santri, jamaah pengajian, hingga jejaring keluarga besar. Melalui jaringan semacam ini, kehadiran kiai tidak berhenti pada figur personal, tetapi berlanjut menjadi pengaruh yang terlembagakan dan terus direproduksi.

Temuan ini sejalan dengan literatur tentang “kiai dan blater” di Madura yang menempatkan kiai sebagai elite utama dengan daya jangkau sosial-politik yang luas. Kiai mendapatkan legitimasi karena agama memberi mereka posisi sebagai penjaga nilai, penentu kepatasan (patut–tidak patut), dan rujukan moral. Dalam masyarakat yang relasi sosialnya masih kuat berbasis kedekatan komunal, suara kiai sering diperlakukan bukan sekadar pendapat, melainkan pertimbangan etis yang memengaruhi cara orang menilai tokoh, memilih pemimpin, atau menyikapi konflik di tingkat lokal.

Jika dibaca melalui teori patron–client, kiai dapat dipahami sebagai patron moral: sosok yang menyediakan “modal sosial-keagamaan” yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalani hidup sehari-hari, membangun rasa aman, dan memperoleh akses pada berbagai kemudahan sosial. Yang dipertukarkan dalam relasi ini tidak selalu berbentuk uang. Justru, pertukaran yang paling sering terlihat adalah bentuk-bentuk bantuan yang melekat pada peran sosial pesantren dan otoritas kiai, seperti:

1. **Akses dan rekomendasi:** misalnya rekomendasi untuk pendidikan santri, akses ke jaringan kerja berbasis alumni, atau pengantar sosial untuk menjembatani warga dengan pihak lain yang lebih “berdaya”.
2. **Perlindungan simbolik:** doa, restu, atau “penguatan moral” yang dianggap penting ketika seseorang menghadapi masalah, mengambil keputusan besar, atau mencari legitimasi di mata masyarakat.
3. **Fasilitas sosial:** dukungan kegiatan keagamaan, bantuan sosial dalam momentum tertentu, serta peran kiai dalam membantu menyelesaikan problem sosial melalui nasihat, mediasi, atau peneguhan norma.

Dalam relasi patron–client, bantuan dari patron menciptakan utang sosial (social debt) yang tidak selalu diucapkan, tetapi dipahami sebagai kewajiban moral untuk membalas biasanya dalam bentuk loyalitas, penghormatan, dan kesediaan mengikuti arahan pada momen-momen penting. Pada periode elektoral, modal sosial-keagamaan ini sering “diterjemahkan” menjadi dukungan politik melalui kanal yang relatif halus namun efektif:

Pertama, jaringan santri–alumni bekerja sebagai jalur penyambung antarwilayah. Mereka menjadi penghubung informasi, penguat reputasi kandidat yang dianggap “dekat” dengan kiai, sekaligus penggerak dukungan di tingkat komunitas kecil (keluarga, tetangga, jamaah). Dalam praktiknya, jaringan ini tidak perlu tampil sebagai tim kampanye formal; cukup lewat obrolan rutin, silaturahmi, atau momentum kegiatan pesantren yang mempertemukan banyak orang.

Kedua, forum pengajian dan silaturahmi menjadi ruang komunikasi politik yang dianggap “sah” secara budaya. Warga menghadiri pengajian dengan motivasi religius, tetapi pada saat yang sama forum tersebut menjadi arena pembentukan opini: siapa tokoh yang dianggap layak, siapa yang dinilai punya adab, siapa yang “amanah”, dan siapa yang dekat dengan pesantren. Di sini, politik tidak selalu hadir sebagai ajakan memilih secara eksplisit, melainkan sebagai pembentukan persepsi moral yang kemudian memengaruhi pilihan.

Ketiga, endorsement tersirat maupun tersurat. Banyak pemilih tidak membutuhkan pernyataan formal “pilih nomor sekian”; cukup dengan sinyal misalnya kedekatan kandidat dengan pesantren, frekuensi kunjungan, cara kandidat menghormati kiai, atau doa/restu yang tampak di ruang publik. Bagi sebagian warga, sinyal semacam itu sudah bermakna sebagai petunjuk moral: kalau kiai “menerima”, maka kandidat dianggap punya kelayakan etis.

Dengan cara kerja seperti ini, kiai tidak hanya menjadi “penentu arah”, tetapi juga berperan sebagai penjaga batas: menentukan mana yang dianggap pantas masuk ke ruang sosial pesantren dan mana yang sulit diterima. Inilah yang menjelaskan mengapa, pada konteks tertentu, dukungan kiai dapat mengkonsolidasikan suara dengan cepat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mesin partai.

5.2.4 Blater sebagai Pengendali Ruang Sosial dan Mesin Mobilisasi

Di tingkat desa, tokoh masyarakat dan sesepuh desa sering menjadi figur yang “dipakai” warga untuk memastikan siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang sebaiknya dihindari. Mereka mungkin tidak punya jabatan formal, tetapi punya legitimasi tradisional: senioritas, asal-usul keluarga, rekam jejak pengabdian, dan kemampuan meredakan konflik ketika ada masalah antarwarga. Karena itu, mereka

berperan sebagai penjamin kepercayaan orang yang membuat hubungan sosial tetap stabil, terutama ketika situasi politik mulai memanas menjelang pemilihan.

Temuan lapangan menguatkan bahwa blater di Bangkalan diposisikan sebagai aktor sosial yang bekerja pada ranah keamanan dan penyelesaian masalah komunitas, bukan semata figur “preman” seperti stereotip yang sering dilekatkan dari luar. Moch. Hafid, salah satu blater yang diwawancarai, menjelaskan bahwa blater dipahami sebagai pihak yang dipercaya masyarakat “untuk menjaga kehormatan, menjaga keamanan, dan menyelesaikan masalah”, terutama ketika jalur formal dianggap lambat atau prosesnya terlalu panjang. Ia menyebut blater sebagai “pelindung kampung”, tempat warga datang bukan semata karena rasa takut, melainkan karena dianggap memiliki kapasitas tindakan cepat dan jaringan sosial yang kuat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sumber kuasa blater bertumpu pada reputasi, jejaring akar rumput, dan kemampuan mengatur situasi lapangan ciri yang selaras dengan konsep local strongman yang memperoleh otoritas dari kontrol sosial dan kapasitas pengamanan dalam kehidupan komunitas. (Wawancara Blater Moch. Hafid)

Jika dibaca melalui kerangka patron–client, sesepuh desa dan tokoh masyarakat kerap berfungsi sebagai broker yang menghubungkan kebutuhan warga dengan sumber daya elite. Pertukaran yang terjadi biasanya tidak dinyatakan sebagai transaksi terang-terangan, namun bekerja sebagai relasi timbal-balik: warga membutuhkan akses bantuan, peluang kerja, atau penyelesaian sengketa; sementara broker menyediakan jalur, rekomendasi, dan jaminan sosial. Sebagai imbalannya, broker memperoleh pengakuan sosial, posisi tawar di desa, serta peluang mempertahankan akses terhadap sumber daya setelah pemilu selesai.

Peran broker desa menjadi semakin penting pada masa elektoral karena mereka bekerja pada “level mikro” yang paling menentukan perilaku memilih: keluarga, tetangga, kelompok arisan, dan komunitas kecil yang saling terhubung. Di ruang seperti ini, preferensi politik sering terbentuk bukan lewat debat program, melainkan lewat reputasi, kedekatan, dan rasa aman. Tokoh masyarakat lalu berperan menstabilkan suasana: menutup potensi konflik, menegosiasikan

perbedaan pilihan, dan memastikan rivalitas politik tidak merusak hubungan sosial yang sudah lama ada. (Scott, J. C. 1972)

Berbeda dengan sesepuh desa yang kuat pada legitimasi tradisional, blater yang dalam kajian tentang Madura kerap dipahami sebagai “jagoan” atau strongman lokal memiliki sumber kuasa yang lebih menonjol pada reputasi keberanian, jaringan pemuda, dan kapasitas pengamanan. Dalam sejumlah studi, blater diposisikan sebagai elite lokal yang hidup di arena sosial berbeda dari kiai: mereka kuat pada penguasaan ruang, kemampuan mengorganisasi, dan daya tekan sosial, meskipun tetap dapat membangun relasi dengan elite lain ketika kepentingan bertemu. (Kosim, M.K 2007)

Dalam praktik politik lokal, blater sering dibutuhkan untuk mengelola dimensi yang tidak selalu mampu ditangani oleh struktur formal: menjaga keamanan kampanye, mengatur logistik kerumunan, memastikan kegiatan berjalan tanpa gangguan, atau mengamankan wilayah-wilayah yang rawan gesekan antarpendukung. Posisi ini membuat blater berfungsi sebagai “pengendali lapangan” aktor yang mengubah dukungan menjadi kehadiran massa, dan mengubah rencana menjadi kontrol ruang sosial secara nyata. (Raditya.A 2011)

Namun, justru karena punya kemampuan mengendalikan ruang sosial, peran blater juga membuka peluang munculnya praktik koersif mulai dari tekanan halus, pengawasan sosial yang menimbulkan rasa segan, sampai intimidasi yang sulit dibuktikan secara administratif. Di sini, kekuatan blater menjadi ambivalen bagi demokrasi: di satu sisi dapat menciptakan stabilitas dan rasa aman bagi kelompok tertentu, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi kebebasan politik warga jika kontrol sosialnya berubah menjadi paksaan.

Temuan penelitian tentang Bangkalan menunjukkan bahwa fenomena local strongman tidak berdiri sendiri, melainkan sering beroperasi dalam pola relasi yang “akomodatif” dengan aktor formal. Dalam pola semacam ini, politisi membutuhkan kapasitas mobilisasi dan pengamanan; birokrasi membutuhkan stabilitas; sementara elite non-formal membutuhkan pengakuan dan akses sumber daya. Relasi saling membutuhkan ini menjelaskan mengapa strongman lokal tetap relevan meskipun prosedur demokrasi berjalan formal melalui pemilu.

Jika kiai kuat pada modal simbolik-keagamaan dan penerimaan sosial, maka blater kuat pada penguasaan ruang dan kemampuan mengorganisasi massa dengan cepat. Karena itu, relasi patron–client pada blater cenderung lebih transaksional: blater menawarkan proteksi, akses jaringan, atau “keamanan sosial”; lalu dibalas dengan loyalitas, kesediaan hadir dalam mobilisasi, serta dukungan elektoral yang bisa dikonsolidasikan di tingkat akar rumput. Pola ini membantu menjelaskan mengapa sebagian warga bisa “terikat” bukan terutama karena kesesuaian program kandidat, tetapi karena ketergantungan pada proteksi dan akses yang dikendalikan simpul-simpul informal di desa. (Ridho, M. Z 2010)

Dari keseluruhan temuan ini, struktur kekuasaan informal di desa dapat diringkas sebagai pembagian peran yang saling melengkapi. Sesepeuh desa dan tokoh masyarakat bekerja sebagai penjamin kepercayaan dan penstabil relasi sosial; sementara blater bekerja sebagai pengendali ruang sosial sekaligus mesin mobilisasi lapangan. Kombinasi keduanya membuat dukungan politik di Bangkalan sering bergerak melalui jalur non-formal: legitimasi tradisional, jaringan perlindungan, dan kontrol sosial yang pada akhirnya membentuk kualitas demokrasi lokal, baik memperkuat stabilitas maupun berpotensi membatasi kebebasan politik warga.

5.3 Relasi Kiai dan Blater: Kerjasama dan Persaingan

Kyai dan blater dapat dipahami sebagai dua komunitas elite lokal Madura yang berjalan dengan “bahasa” dan sumber pengaruh yang berbeda. Kyai umumnya melekat pada nilai-nilai agama yang dipandang *hanif* dan menjadi rujukan moral bagi warga. Wibawa kyai tumbuh dari beberapa hal yang mudah dikenali masyarakat: garis keturunan (*genealogis*), penguasaan ilmu agama, kepribadian, serta kepedulian dan kedekatan dengan umat. Sementara itu, blater lebih sering dipersepsikan melalui citra kekerasan dan ketegasan. Pengaruh mereka tidak jarang bertumpu pada kekuatan fisik, keberanian menghadapi risiko, kemampuan bertarung, serta reputasi kemenangan yang membentuk rasa segan di lingkungan sekitar. Karena itulah, dalam pandangan banyak orang, peran dan fungsi sosial kyai dan blater kerap terlihat berseberangan yang satu dianggap menjaga nilai dan ketertiban moral, sementara yang lain diasosiasikan dengan praktik “keras” di lapangan. (Kosim.M 2007)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi kiai–blater di tingkat lokal tidak dapat disederhanakan sebagai hubungan yang semata-mata antagonistik. Dalam wawancara, Kiai Muqtafi Asyqal menegaskan bahwa hubungan dengan figur sosial seperti blater “umumnya baik” selama blater menghormati nilai-nilai agama dan tidak menimbulkan kekacauan. Pernyataan ini memperlihatkan adanya prasyarat normatif dalam relasi tersebut, yakni penghormatan terhadap nilai agama dan ketertiban sosial sebagai batas yang menjaga hubungan tetap berjalan secara wajar di mata kiai.

Kiai Muqtafi Asyqal juga menyampaikan bahwa banyak blater “sebenarnya sangat menghormati kiai.” Bentuk penghormatan itu tampak dari perilaku blater yang datang meminta nasihat dan kesediaan mereka terlibat dalam membantu pengamanan kegiatan pesantren. Dari sisi kiai, temuan ini menunjukkan bahwa relasi tidak selalu berlangsung dalam jarak sosial; sebaliknya, terdapat ruang interaksi langsung yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiai bahkan menekankan bahwa relasi tersebut “tidak selalu seperti yang dibayangkan orang luar,” yang mengindikasikan bahwa pola hubungan di lapangan memiliki variasi dan fleksibilitas tertentu. (Wawancara Kh. Muqtafi Asyqal (salah satu cicit Kh. Cholil Bangkalan)

Dalam konteks kegiatan keagamaan dan sosial, kerja sama menjadi bentuk relasi yang paling sering muncul. Kiai Muqtafi Asyqal menyatakan bahwa kerja sama “sering terjadi,” terutama ketika pesantren menyelenggarakan kegiatan besar seperti haul, pengajian akbar, dan kegiatan sosial. Pada situasi tersebut, blater disebut membantu menjaga keamanan. Data ini menggambarkan adanya pembagian peran praktis: kegiatan yang menghadirkan massa dan berpotensi menimbulkan kerumunan memerlukan dukungan pengamanan, dan blater mengisi fungsi tersebut dalam praktik lapangan.

Kerja sama pengamanan yang disebutkan kiai bukanlah fenomena insidental, melainkan berulang pada momentum tertentu yang bersifat komunal. Haul dan pengajian akbar, misalnya, merupakan kegiatan yang melibatkan mobilisasi jamaah dalam jumlah besar, sehingga kebutuhan akan ketertiban dan rasa aman menjadi meningkat. Kehadiran blater dalam konteks ini ditunjukkan

bukan sebagai pihak yang mengganggu, tetapi sebagai aktor yang berkontribusi menjaga kondusivitas acara. Dengan demikian, relasi yang tampak dalam data mengarah pada interaksi fungsional yang terikat oleh kebutuhan situasional.

Namun, temuan juga menunjukkan bahwa relasi tidak selalu berlangsung mulus. Kiai Muqtafi Asyqal menyebut ketegangan “pernah ada,” terutama ketika terdapat perilaku yang dinilai menyalahi syariat atau membahayakan masyarakat. Pernyataan ini menegaskan adanya batas evaluatif yang digunakan kiai untuk menilai tindakan blater atau tindakan tertentu yang terkait dengan lingkungan sosialnya. Ketegangan bukan dinyatakan sebagai konflik permanen, melainkan sebagai kondisi yang muncul pada keadaan spesifik ketika tindakan tertentu dipersepsikan melanggar norma agama atau mengganggu keselamatan sosial.

Menariknya, ketika ketegangan muncul, kiai tidak menampilkan pola konfrontasi langsung, melainkan memilih strategi komunikasi yang berhati-hati. Kiai Muqtafi Asyqal menyampaikan bahwa ia “menegur” namun memahami cara menyampaikannya, bahkan menekankan bahwa teguran biasanya disampaikan “dengan halus.” Alasan yang disebutkan adalah karena blater memiliki “pride” dan “harga diri.” Data ini memperlihatkan bahwa dalam praktik relasi, kiai mempertimbangkan aspek psikologis dan status sosial blater agar teguran tidak berubah menjadi eskalasi konflik.

Dari sisi blater, temuan memperlihatkan pengakuan atas adanya kerja sama dengan kiai dalam urusan sosial. Blater Moch. Hafid menjelaskan bentuk kerja sama yang konkret, seperti menjaga keamanan acara besar pesantren, mengawal kegiatan keagamaan, serta membantu memastikan suasana tetap kondusif ketika terjadi masalah di desa. Uraian ini mengonfirmasi pernyataan kiai terkait fungsi pengamanan, sekaligus memperluas konteks bahwa keterlibatan blater juga menyentuh situasi sosial desa yang lebih luas, tidak terbatas pada agenda pesantren semata.

Selain kegiatan keagamaan, blater juga menyebut keterlibatan dalam urusan bantuan sosial. Moch. Hafid menyampaikan bahwa mereka ikut membantu agar distribusi bantuan berlangsung aman dan tidak memunculkan keributan. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi kiai–blater tidak hanya beroperasi dalam ranah

simbolik keagamaan, tetapi juga pada praktik sosial yang menyangkut distribusi sumber daya di masyarakat. Dalam konteks tersebut, peran blater digambarkan sebagai pengelola situasi lapangan untuk mencegah gangguan ketertiban.

Pada ranah politik, data memperlihatkan bahwa perbedaan pilihan tidak otomatis memutus relasi. Moch. Hafid menyatakan bahwa dalam politik “kadang kami bisa berbeda pilihan, tapi tetap saling hormat.” Ia menambahkan bahwa kiai “menjaga moralnya,” sedangkan blater “menjaga sisi lapangannya,” dengan penekanan bahwa yang penting masyarakat tidak pecah hanya karena urusan pilihan. Pernyataan ini menggambarkan adanya orientasi menjaga kohesi sosial di tengah perbedaan preferensi politik, sekaligus menunjukkan bahwa masing-masing aktor mengidentifikasi posisi dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjaga stabilitas sosial.

Ketika ditanya lebih spesifik mengenai situasi jika kiai mendukung kandidat yang berbeda, Moch. Hafid menyampaikan bahwa ia tetap menghormati karena kiai memiliki pertimbangan sendiri. Ia menegaskan bahwa mereka “jarang bentrok” dengan kiai soal pilihan politik. Dalam praktiknya, jika berbeda, yang dilakukan adalah “membatasi diri” untuk tidak mengganggu jaringan kiai dan tetap menjaga persaudaraan. Data ini menunjukkan adanya mekanisme pengendalian diri dan pengaturan batas interaksi politik agar relasi sosial tidak berubah menjadi konflik terbuka.

Moch. Hafid juga memberikan penjelasan normatif mengenai alasan di balik sikap tersebut. Ia menyebut bahwa “politik itu sementara,” sedangkan hubungan dengan kiai merupakan bagian dari “adab.” Walaupun pernyataan ini memuat landasan nilai, ia tetap menjadi data penting untuk memahami logika perilaku aktor dalam menjaga relasi. Dalam temuan ini, penghormatan terhadap kiai tidak hanya berbentuk tindakan kooperatif dalam kegiatan sosial, tetapi juga berbentuk pembatasan perilaku dalam kompetisi politik agar tidak menimbulkan friksi sosial.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa relasi kiai blater berjalan melalui dua pola yang hadir bersamaan: kerja sama yang tampak dominan pada kegiatan keagamaan, sosial, dan pengelolaan ketertiban; serta

ketegangan yang muncul pada kondisi tertentu, terutama ketika tindakan dinilai melanggar norma agama atau mengancam keamanan masyarakat. Data dari kedua pihak menunjukkan adanya pengakuan timbal balik kiai mengakui penghormatan dan kontribusi blater dalam menjaga keamanan, sementara blater mengakui otoritas moral kiai dan memilih menjaga batas ketika terjadi perbedaan, termasuk dalam politik.

Dengan demikian, hubungan kiai–blater dalam temuan ini dapat dipahami sebagai relasi yang bersifat situasional dan terkelola, di mana kerja sama diaktifkan untuk kepentingan ketertiban dan kelancaran aktivitas sosial, sementara potensi ketegangan dihadapi melalui strategi komunikasi dan kontrol diri agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Pola-pola tersebut tampak konsisten dalam narasi informan, baik dari pihak kiai maupun blater, sehingga memberikan gambaran empiris yang koheren mengenai dinamika kerja sama dan persaingan yang menyertai interaksi keduanya di tingkat lokal.

5.4 Interaksi Kekuasaan Informal dengan Institusi Politik Formal

Dalam pemilihan kepala daerah terutama pemilihan bupati peran tokoh agama dan tokoh masyarakat tetap menempati posisi yang menentukan dalam membentuk arah dukungan politik di tingkat lokal. Mereka bukan sekadar pelengkap simbolik demokrasi elektoral, melainkan aktor yang secara nyata hadir dalam kehidupan sosial warga, berinteraksi langsung dengan komunitas, dan karena itu memiliki otoritas sosial yang sulit ditandingi oleh aktor politik formal. Di banyak desa, orientasi politik masyarakat tidak lahir semata dari paparan program dan kampanye, tetapi dibentuk melalui jaringan kepercayaan yang telah mengakar lama, yakni jaringan yang melekat pada figur-figur yang disegani dan dianggap “mewakili” nilai kepemimpinan komunitas.

Tokoh masyarakat dalam konteks ini dapat dipahami sebagai representasi dari nilai-nilai yang dijadikan acuan warga dalam menilai kepemimpinan: keteladanan, kemampuan mengayomi, konsistensi dalam membantu warga, hingga kecakapan mengelola konflik. Karakter kepemimpinan yang melekat pada tokoh-tokoh tersebut menjadikan mereka berperan sebagai “penentu rujukan” (reference point) bagi keputusan sosial di tingkat komunitas, termasuk dalam urusan politik.

Pengaruh mereka tidak hadir dari jabatan formal, melainkan dari rekam jejak, intensitas keterlibatan sosial sehari-hari, serta kemampuan membangun jaringan bantuan dan solidaritas. Di titik ini, otoritas sosial bekerja sebagai modal politik yang nyata.

Berkat kelebihan dalam pengetahuan, pengaruh, dan sering kali juga sumber daya ekonomi, tokoh masyarakat kerap dikelompokkan sebagai bagian dari elite lokal. Elite lokal di sini bukan sekadar kelompok “orang berpengaruh”, melainkan individu yang memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi keputusan politik dan sosial komunitas, baik melalui jalur persuasif maupun melalui jaringan yang ia miliki. Dalam tradisi teori *Local Strongman*, struktur masyarakat tidak sepenuhnya bergerak setara; selalu ada kelompok kecil yang lebih mampu membentuk arah keputusan publik karena memiliki akses, otoritas, atau pengaruh yang diakui oleh kelompok yang lebih luas. Kerangka semacam ini membantu menjelaskan mengapa figur tertentu menjadi rujukan politik yang strategis dalam kontestasi lokal.

Dalam praktik kampanye, kandidat bersama tim sukses biasanya merancang strategi komunikasi secara terencana, dengan tujuan utama memengaruhi persepsi pemilih. Namun, strategi ini tidak selalu efektif bila hanya mengandalkan kanal formal seperti rapat partai, baliho, atau pidato kampanye. Dalam masyarakat yang relasi sosialnya masih komunal, pesan politik lebih mudah dipercaya ketika disampaikan oleh figur yang sudah memiliki kredibilitas sosial. Karena itu, tokoh lokal seperti kiai dan blater sering menjadi “komunikator politik” yang daya pengaruhnya melampaui jangkauan komunikasi formal kandidat.

Posisi kiai dan blater sebagai komunikator politik bertumpu pada kedekatan mereka dengan kehidupan sosial masyarakat dan intensitas interaksi yang berlangsung sehari-hari. Kiai umumnya berada di pusat jejaring keagamaan pengajian, pesantren, silaturahmi yang sekaligus menjadi ruang produksi kepercayaan. Blater, dalam konteks tertentu, hadir sebagai figur yang dikenal karena kapasitasnya mengelola situasi sosial, menjaga ketertiban, atau menyelesaikan persoalan tertentu di tingkat akar rumput. Kedua figur ini membuat pesan kandidat terasa lebih personal, lebih meyakinkan, dan sering kali lebih sulit ditolak karena dibalut legitimasi sosial yang sudah ada sebelumnya.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah sendiri menyadari dan memanfaatkan realitas sosial tersebut. Wakil Bupati Fauzan Ja'far menjelaskan bahwa hubungan pemerintah dengan kiai cenderung dekat dan komunikatif. Banyak kebijakan sosial atau program pemerintah disosialisasikan melalui forum keagamaan, kunjungan silaturahmi ke pesantren, serta undangan resmi bagi para kiai. Pola ini mengindikasikan bahwa jalur keagamaan tidak hanya dipandang sebagai ruang spiritual, tetapi juga sebagai kanal komunikasi publik yang efektif karena berangkat dari sumber kepercayaan yang sudah mapan di masyarakat.

Keterangan dari Wabup juga menegaskan bahwa hubungan dengan blater memiliki karakter berbeda: lebih pragmatis dan situasional. Pemerintah mengetahui bahwa di beberapa wilayah, blater memiliki peran sosial tertentu sehingga hubungan tersebut perlu dikelola dengan kehati-hatian. Di satu sisi, pemerintah harus tetap menegakkan hukum; di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk merangkul tokoh yang punya pengaruh agar energi sosialnya dapat diarahkan pada hal-hal yang positif, bukan menjadi sumber gangguan. Pernyataan ini memperlihatkan dilema institusional: negara bekerja melalui aturan formal, tetapi ketertiban sosial sehari-hari sering kali tidak bisa dilepaskan dari figur-figur informal yang berpengaruh di komunitas.

Dari sisi kiai, narasi yang muncul memperkuat gambaran tersebut. Kiai Muqtafi Asyqal menyatakan bahwa hubungan dengan pejabat formal berlangsung dalam prinsip saling menghormati. Pemerintah sering berkunjung ke pesantren untuk meminta nasihat, baik terkait pendidikan, persoalan sosial, maupun masalah masyarakat tertentu. Yang menarik, kiai juga menegaskan sebuah mekanisme sosial penting: kebijakan lebih mudah diterima masyarakat bila disampaikan melalui kiai, karena warga percaya pada jalur tersebut. Ini menunjukkan bahwa kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai “penerjemah kebijakan” yang menghubungkan bahasa negara dengan bahasa komunitas.

Dalam konteks ini, kiai berperan sebagai penghubung antara institusi formal dan warga, terutama dalam aspek legitimasi sosial kebijakan. Pemerintah memperoleh keuntungan berupa penerimaan sosial yang lebih tinggi, sementara

kiai mempertahankan posisinya sebagai penjaga moral komunitas dan mediator kepentingan sosial. Relasi yang tampak seperti “silaturahmi” pada permukaan sebenarnya memuat fungsi politik yang konkret: memastikan program pemerintah tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi tindakan yang dipahami dan diterima komunitas.

Blater pun menunjukkan bentuk interaksi yang khas dengan institusi formal, termasuk dalam relasinya dengan penyelenggara pemilu. Blater Moch. Hafid menyatakan pernah berinteraksi dengan penyelenggara pemilu, tetapi biasanya tidak dalam format formal. Interaksi tersebut muncul, misalnya untuk memastikan situasi aman di TPS wilayahnya dan menjaga suasana agar tidak terjadi masalah. Meskipun terdengar sederhana, keterangan ini penting karena memperlihatkan bagaimana keamanan pemilu yang secara normatif menjadi tanggung jawab institusi formal di tingkat lokal sering ikut bergantung pada jaringan sosial dan figur yang punya pengaruh di lapangan.

Relasi ini juga membantu menjelaskan mengapa Pilkada di tingkat lokal tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai mekanisme kompetisi programatik semata. Pilkada memang instrumen demokrasi elektoral, tetapi di saat yang sama membuka ruang bagi tokoh-tokoh lokal untuk mengaktualisasikan gagasan, pengaruh, dan kepentingan yang dianggap bermanfaat bagi komunitasnya. Kedekatan emosional tokoh masyarakat dengan warga menjadikan mereka aktor strategis dalam menyampaikan aspirasi serta mengartikulasikan harapan publik kepada kandidat. Dengan demikian, kontestasi politik bergerak dalam dua arena sekaligus: arena formal (aturan, lembaga, prosedur) dan arena sosial-kultural (kepercayaan, patronase, jaringan pengaruh).

Di Kabupaten Bangkalan, temuan ini semakin menonjol karena struktur sosial masih kuat ditopang nilai tradisional dan ikatan kultural. Partisipasi politik tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh struktur komunal dan patronistik, di mana hubungan sosial personal, reputasi keluarga, dan jaringan tokoh lokal membentuk peta dukungan. Kiai dan blater yang telah mengakar dalam kultur lokal bukan hanya hadir sebagai penyambung lidah rakyat, melainkan juga agen pembentuk orientasi

politik masyarakat mengarahkan cara warga menilai kandidat, memilih posisi, serta memahami makna “pemimpin yang layak”.

Jika ditarik ke tingkat strategi kandidat, konsekuensinya cukup jelas. Kandidat tidak hanya membangun dukungan melalui jalur partai dan kampanye formal, tetapi juga menyusun strategi yang menautkan diri pada simpul-simpul pengaruh lokal. Kedekatan dengan kiai memberi akses legitimasi dan penerimaan komunitas, sekaligus kanal penyampaian pesan yang kredibel. Sementara itu, relasi dengan blater meskipun lebih pragmatis dan situasional — berfungsi untuk pengelolaan lapangan, stabilitas keamanan sosial, dan pengendalian risiko konflik yang dapat mengganggu mobilisasi. Strategi kampanye kemudian menjadi kombinasi antara komunikasi persuasif dan manajemen jaringan sosial.

Dengan demikian, peran kiai dan blater sebagai elite lokal memperlihatkan bahwa demokrasi lokal bekerja melalui interaksi kompleks antara formalitas institusi dan realitas sosial yang hidup. Negara dan penyelenggara pemilu tidak bergerak dalam ruang hampa; penerimaan kebijakan, ketertiban kampanye, dan stabilitas pemungutan suara berkelindan dengan jejaring kepercayaan dan pengaruh yang sudah lama mengakar. Temuan wawancara menegaskan bahwa baik pemerintah daerah maupun aktor informal sama-sama memahami logika tersebut: kebijakan dan proses politik menjadi lebih efektif ketika melewati jalur yang dipercaya masyarakat, sementara stabilitas sosial lebih mudah dijaga ketika energi pengaruh lokal diarahkan untuk mendukung ketertiban, bukan memicu ketegangan.

Pada akhirnya, uraian ini memperkuat argumentasi bahwa studi tentang Pilkada Bangkalan perlu memandang tokoh lokal bukan sebagai “aksesori” politik, tetapi sebagai struktur pengaruh yang membentuk cara institusi formal bekerja di lapangan. Dengan menyatukan narasi teoritik elite dan temuan empiris wawancara, dapat dipahami bahwa strategi kandidat dalam Pilkada bukan hanya persoalan program dan popularitas, melainkan kemampuan membaca serta merangkai relasi dengan simpul-simpul kekuasaan informal yang hidup di komunitas. Ini pula yang menjelaskan mengapa kampanye dan mobilisasi di tingkat lokal sering lebih efektif ketika dijalankan melalui figur yang memiliki kepercayaan sosial, kedekatan emosional, dan kapasitas pengaruh yang telah diuji dalam kehidupan sehari-hari.

5.4 Pengaruh Kiai dan Blater terhadap Perilaku Pemilih dan Loyalitas Elektoral

Dalam struktur sosial masyarakat Bangkalan, posisi kiai tidak berhenti pada peran sebagai pemimpin keagamaan. Ia hadir sebagai rujukan moral sekaligus konsultan kehidupan yang dimintai pertimbangan dalam berbagai urusan. Masyarakat mempraktikkan tradisi *nyabis*, yakni mendatangi kiai untuk meminta doa, restu, dan nasihat sebelum mengambil keputusan penting. Praktik ini tidak terbatas pada persoalan spiritual, tetapi juga menyentuh ranah ekonomi, bisnis, migrasi, hingga hajatan keluarga. *Nyabis* menjadi mekanisme kultural yang merekatkan hubungan patronase berbasis kepercayaan antara kiai dan masyarakat.

Tradisi tersebut membentuk pola relasi yang bersifat personal sekaligus struktural. Dalam konteks sosial Madura yang religius, legitimasi seorang kiai lahir dari kombinasi otoritas keilmuan agama, keteladanan moral, serta jejaring pesantren yang luas. Ketika seseorang hendak merantau atau membuka usaha, mendatangi kiai dipahami sebagai langkah mencari keberkahan sekaligus memastikan keputusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, *nyabis* bukan sekadar ritual simbolik, melainkan institusi sosial yang menopang reproduksi otoritas kiai di tingkat akar rumput. (Zahro.F 2024)

Ekspansi tradisi ini ke dalam arena politik elektoral merupakan konsekuensi logis dari kuatnya legitimasi tersebut. Dalam kontestasi Pilkada 2024 di Bangkalan, hampir setiap kandidat menjalin komunikasi intensif dengan kiai sebelum mendeklarasikan pencalonan. Restu kiai dipandang sebagai modal sosial yang signifikan untuk memasuki basis pemilih religius. Bahkan, izin untuk menampilkan foto kiai berdampingan dengan kandidat dalam alat peraga kampanye dipersepsikan sebagai sinyal dukungan yang kuat, yang mampu membentuk persepsi publik mengenai kelayakan moral calon.

Pengaruh ini diperkuat oleh struktur jaringan alumni pesantren yang kini semakin terorganisir. Banyak pesantren memiliki forum alumni yang tersusun secara hierarkis hingga tingkat dusun. Struktur tersebut memudahkan konsolidasi dukungan secara sistematis. Dalam praktiknya, satu figur kiai dapat memiliki basis massa ratusan hingga ribuan orang, terdiri atas alumni, wali santri, dan simpatisan

yang memiliki ikatan emosional maupun historis dengan pesantren tertentu. Jaringan ini menjadikan otoritas kiai tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam mobilisasi suara.

Temuan wawancara dengan Wakil Bupati Fauzan Ja'far mengonfirmasi bahwa komunikasi dengan kiai dan jaringan informal lainnya merupakan bagian yang dianggap “adat” dalam dinamika politik lokal. Kandidat tidak hanya berkompetisi di ruang formal seperti debat publik atau kampanye resmi, tetapi juga membangun legitimasi di teras pesantren, rumah tokoh masyarakat, dan forum-forum silaturahmi yang bersifat informal. Arena informal ini justru sering kali menjadi ruang negosiasi yang lebih menentukan dibanding panggung formal.

Menurut Fauzan Ja'far, dukungan kiai memang sulit diukur secara kuantitatif, namun pengalaman empiris menunjukkan bahwa dukungan tersebut mampu mengonsolidasikan suara di wilayah yang memiliki basis religius kuat. Terutama pada komunitas yang memiliki hubungan historis dengan pesantren tertentu, preferensi politik kerap mengikuti arah sikap kiai. Dalam konteks ini, otoritas religius bertransformasi menjadi kekuatan elektoral melalui mekanisme kepercayaan kolektif.

Namun demikian, dukungan kiai umumnya tidak diekspresikan dalam bentuk instruksi eksplisit. Kiai Muqtafi Asyqal menjelaskan bahwa dukungan sering diwujudkan melalui pemberian restu, penerimaan kunjungan kandidat, atau penyampaian nasihat umum kepada jamaah. Ia jarang menyampaikan perintah langsung untuk memilih calon tertentu. Meskipun demikian, masyarakat kerap menafsirkan sikap kiai sebagai isyarat politik. Di sinilah bekerja apa yang dalam sosiologi politik disebut sebagai pengaruh simbolik: sikap yang tidak eksplisit namun memiliki daya arah yang kuat.

Mayoritas jamaah cenderung mengikuti arah dukungan kiai karena meyakini integritas dan pertimbangan moralnya. Meski demikian, tidak semua pemilih bersikap homogen. Sebagian tetap menentukan pilihan secara otonom. Fakta ini menunjukkan bahwa pengaruh kiai bersifat dominan namun tidak absolut. Pilihan politik tetap berada pada ruang agensi individu, meskipun dibingkai oleh struktur otoritas religius yang kuat.

Di sisi lain, peran blater dalam politik lokal Bangkalan memiliki karakteristik berbeda. Relasi sosial blater tidak hanya didasarkan pada kepentingan pragmatis, melainkan berakar pada nilai-nilai budaya lokal seperti *atretan* (persaudaraan) dan *abengсах* (pergaulan). Konsep *atretan* melampaui hubungan darah dan merujuk pada ikatan emosional yang dibangun melalui interaksi jangka panjang serta komitmen menjaga integritas bersama. Sementara *abengсах* menekankan etika sosial seperti tidak menimbulkan masalah, menjaga sopan santun, dan menghindari kesombongan.

Nilai-nilai tersebut membentuk habitus sosial yang melahirkan etos blater sebagai figur yang bertanggung jawab (*dines*) dan berwibawa (*jeg-jeg*). Dalam perspektif teori modal simbolik, internalisasi nilai budaya ini menghasilkan legitimasi sosial yang membuat blater disegani. Karisma dan kedermawanan yang ditampilkan tidak semata-mata strategi pencitraan, melainkan refleksi dari norma sosial yang telah lama mentradisi.

Dalam konteks Pilkada 2024, Fauzan Ja'far menilai bahwa pengaruh blater lebih terasa pada aspek mobilisasi lapangan. Blater berperan dalam mengumpulkan massa, menjaga kondusivitas kampanye, dan memengaruhi preferensi di lingkungan tertentu. Dukungan mereka tidak selalu formal, tetapi efeknya nyata dalam dinamika elektoral. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan informal blater bekerja melalui kontrol ruang sosial dan pengelolaan situasi di tingkat komunitas.

Blater Moch. Hafid menjelaskan bahwa bentuk dukungan yang diberikan umumnya mencakup tiga aspek: mobilisasi massa melalui jaringan kedekatan, pengamanan kegiatan kampanye agar tetap kondusif, serta pengaruh personal terhadap individu yang memiliki hubungan dekat dengannya. Dukungan tersebut dipersepsikan warga bukan sebagai tekanan politik, melainkan rekomendasi dari figur yang mereka percaya. Hubungan kedekatan inilah yang memperkuat daya pengaruh blater.

Kepercayaan masyarakat terhadap blater juga diperkuat oleh konsistensi dalam menepati janji (*amanah*) serta keberpihakan pada masyarakat kecil sebagai pelindung dan mediator konflik. Dalam struktur sosial yang menempatkan etos keberanian dan kejantanan sebagai simbol kehormatan, figur yang dianggap *angko*

pemberani dan tangguh memiliki posisi sosial yang tinggi. Budaya jagoanisme lokal membingkai blater sebagai penjaga marwah keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, kekuatan sosial blater dalam politik lokal tidak semata bersifat transaksional. Ia berakar pada keberhasilan merawat jejaring sosial berbasis nilai kultural yang kuat. Blater menjadi jembatan antara kepentingan elite dan aspirasi akar rumput, sekaligus simbol integritas lokal yang diakui komunitasnya. Kekuatan ini bersifat embedded dalam struktur sosial, sehingga sulit dipisahkan dari dinamika politik formal.

Dari perspektif pemerintah daerah, mobilisasi berbasis jaringan informal dipandang sebagai cerminan kuatnya partisipasi sosial. Namun terdapat risiko apabila mobilisasi tersebut bergeser menjadi tekanan sosial, intimidasi, atau praktik politik uang. Oleh karena itu, negara berkepentingan memastikan bahwa seluruh aktivitas politik tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pilkada Bangkalan 2024 tidak hanya merupakan kontestasi formal antar kandidat, melainkan juga arena interaksi kompleks antara struktur kekuasaan formal dan informal. Kiai membentuk preferensi melalui legitimasi moral dan jaringan religius, sementara blater memperkuat loyalitas dan mobilisasi melalui jejaring sosial berbasis nilai budaya. Keduanya beroperasi dalam ruang yang berbeda namun saling melengkapi, membentuk konfigurasi kekuasaan lokal yang khas.

5.5 Implikasi Relasi Kiai–Blater terhadap Kualitas Demokrasi Lokal di Bangkalan

Pemilihan umum dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia tidak dapat direduksi sebagai prosedur administratif semata, melainkan harus dipahami sebagai mekanisme normatif untuk merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemilu merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa kekuasaan politik memperoleh legitimasi secara sah dan demokratis. Dalam kerangka ini, kualitas pemilu tidak hanya diukur dari

kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana ia menjamin kebebasan, kesetaraan, dan integritas. (Yahya.I. 2014)

Secara substantif, pemilu yang demokratis menuntut perlindungan hak pilih, kompetisi yang adil, serta jaminan terhadap kebebasan warga dalam menentukan preferensi politiknya. Prinsip “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” bukan sekadar asas formal, melainkan standar etik yang menuntut praktik politik yang bebas dari tekanan, manipulasi, dan dominasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi baik oleh aktor formal maupun informal perlu dianalisis dalam perspektif konstitusional.

Dalam demokrasi lokal di Bangkalan, dinamika pemilu tidak terlepas dari peran aktor informal seperti kiai dan blater. Kehadiran mereka merupakan bagian dari struktur sosial yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Madura. Namun, keterlibatan aktor informal dalam kontestasi elektoral menimbulkan pertanyaan normatif: apakah relasi tersebut memperkuat demokrasi berbasis komunitas, atau justru berpotensi membatasi otonomi politik warga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Ja'far, diperoleh gambaran bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga posisi netral dan terbuka terhadap seluruh kelompok masyarakat, termasuk aktor informal. Ia menegaskan bahwa komunikasi politik tidak boleh eksklusif dan program pemerintah harus berdampak luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran institusional untuk mencegah praktik patronase yang berlebihan.

Lebih lanjut, Fauzan Ja'far memandang relasi kekuasaan informal memiliki dua sisi. Di satu sisi, tokoh informal dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, serta membantu stabilitas sosial. Di sisi lain, relasi tersebut berpotensi melemahkan demokrasi apabila dimanfaatkan untuk tekanan politik, mobilisasi berbasis kepentingan sempit, atau praktik politik uang. Ambivalensi ini mencerminkan karakter demokrasi lokal yang bersifat kontekstual.

Dari perspektif kiai, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Muqtafi Asyqal, dukungan politik tidak selalu dimaknai sebagai upaya memperoleh keuntungan pribadi. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta imbalan material setelah kandidat yang didukung menang. Namun demikian, ia mengakui adanya dampak sosial, seperti kemudahan akses bantuan bagi pesantren atau kelancaran komunikasi dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya keuntungan kolektif berbasis jaringan sosial, meskipun tidak diklaim sebagai transaksi langsung.

Kiai Muqtafi juga menegaskan bahwa peran utama kiai dalam demokrasi adalah menjaga moralitas publik. Ia memosisikan diri sebagai penyejuk, penengah konflik, dan pendidik politik yang mendorong masyarakat menghindari politik uang serta fanatisme buta. Dalam kerangka ini, demokrasi dipandang memerlukan fondasi etis agar tidak tereduksi menjadi kompetisi kekuasaan semata.

Sementara itu, Blater Moch. Hafid menyampaikan bahwa dirinya tidak secara eksplisit meminta imbalan politik setelah pemilu. Akan tetapi, ia mengakui bahwa akses komunikasi dengan pemerintah menjadi lebih mudah, terutama dalam pengurusan kegiatan sosial atau bantuan komunitas. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi timbal balik yang bersifat sosial-politis, meskipun tidak selalu terlembagakan secara formal.

Blater juga menegaskan bahwa perannya dalam masyarakat adalah menjaga keamanan sosial, menjadi penengah konflik, dan memastikan perbedaan pilihan politik tidak memecah solidaritas desa. Ia memandang bahwa blater dapat berfungsi positif apabila diarahkan untuk menjaga stabilitas, namun dapat merusak demokrasi apabila digunakan sebagai alat tekanan atau mobilisasi destruktif.

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa relasi antara aktor informal dan kekuasaan formal di Bangkalan bersifat negosiatif. Tidak ditemukan indikasi eksplisit mengenai pembagian imbalan material secara langsung, tetapi terdapat pola kemudahan akses dan komunikasi yang dapat dikategorikan sebagai keuntungan sosial-politik. Dalam perspektif teori politik lokal, kondisi ini mencerminkan praktik patronase lunak (soft patronage), yakni hubungan timbal balik berbasis jaringan sosial tanpa kontrak eksplisit.

Dalam teori politik lokal, desentralisasi pasca-reformasi telah membuka ruang bagi munculnya elite-elite lokal dengan basis sosial yang kuat. Struktur kekuasaan tidak hanya bertumpu pada jabatan formal, tetapi juga pada legitimasi kultural dan kapasitas mobilisasi. Di Bangkalan, kiai dan blater menjadi bagian dari konfigurasi tersebut.

Konsep local strongman menjelaskan fenomena ini secara lebih tajam. Teori ini menyoroti keberadaan figur berpengaruh yang mengendalikan sumber daya sosial dan politik di tingkat lokal melalui reputasi, jaringan, dan kemampuan mobilisasi. Blater, dalam konteks Madura, memiliki karakteristik yang mendekati tipologi ini, meskipun dalam praktik kontemporer perannya lebih bersifat sosial daripada koersif.

Namun, berbeda dengan strongman dalam pengertian otoritarian, relasi yang terungkap dalam penelitian ini menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap norma demokrasi. Baik kiai maupun blater secara normatif mengakui pentingnya menjaga kebebasan politik dan stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan transformasi peran dari aktor dominatif menjadi mediator sosial-politik.

Meski demikian, potensi dominasi simbolik tetap ada. Otoritas moral kiai dan reputasi sosial blater dapat menciptakan tekanan sosial terselubung yang memengaruhi preferensi politik warga. Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif, kondisi ini dapat mengurangi kualitas diskursus publik apabila warga merasa sungkan atau enggan berbeda pendapat.

Dari sudut pandang integritas pemilu, relasi informal yang tidak transparan berpotensi menciptakan ketimpangan akses terhadap kebijakan publik. Kemudahan komunikasi yang diperoleh jaringan tertentu dapat menimbulkan persepsi eksklusivitas, meskipun tidak selalu melanggar hukum secara formal. Oleh karena itu, pengawasan konstitusional tetap diperlukan.

Dalam konteks kebijakan, negara perlu mengintegrasikan pendekatan sosiologis ke dalam regulasi pemilu. Transparansi keterlibatan tokoh non-struktural dalam tim kampanye dapat meningkatkan akuntabilitas. Pengawasan terhadap

praktik mobilisasi berbasis tekanan simbolik juga menjadi penting untuk menjaga kebebasan politik.

Selain itu, pendidikan politik yang sistematis di tingkat akar rumput perlu diperkuat. Upaya ini bertujuan membangun pemilih yang rasional dan otonom, sehingga relasi patronase tidak menjadi satu-satunya basis partisipasi politik. Pendidikan politik juga dapat memperkuat daya kritis masyarakat terhadap praktik manipulatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kiai–blater dalam demokrasi lokal Bangkalan bersifat ambivalen. Ia dapat menjadi instrumen penguatan partisipasi dan stabilitas, tetapi juga menyimpan potensi distorsi terhadap kebebasan dan kesetaraan politik.

Kualitas demokrasi lokal sangat bergantung pada bagaimana relasi tersebut dikelola. Apabila diarahkan sebagai kemitraan konstruktif yang menjunjung prinsip hukum dan moralitas publik, ia dapat memperkuat demokrasi berbasis komunitas. Sebaliknya, apabila dibiarkan tanpa pengawasan normatif, ia berpotensi mempersempit ruang otonomi politik warga.

Dengan demikian, sintesis antara norma konstitusional dan realitas sosial menjadi kunci. Demokrasi konstitusional Indonesia harus mampu mengakomodasi struktur sosial lokal tanpa mengorbankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan integritas.

Temuan ini menegaskan bahwa demokrasi lokal bukan sekadar persoalan prosedur, melainkan arena negosiasi antara kekuasaan formal dan legitimasi kultural. Di Bangkalan, negosiasi tersebut masih berada dalam koridor yang relatif stabil, namun tetap memerlukan penguatan regulasi dan pendidikan politik agar demokrasi substantif dapat terus berkembang.